



Fact sheet **Pembangunan Responsif Gender Provinsi Sulawesi Selatan**

Ringkasan Hasil FGD Penggalan Isu Kesenjangan Gender dalam Berbagai Aspek Perubahan Iklim di Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan bersama ICRAF Indonesia

13-14 Desember 2022



“

Karena perempuan menjadi kelompok rentan, sehingga perlu mengedukasi dan **meningkatkan kapasitas perempuan** dalam rangka perubahan iklim ini, untuk **meningkatkan kesejahteraan hidup** mereka”

- **Andi Mirna, S.H.**

(Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan)



Isu Kesenjangan Gender dalam berbagai aspek perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Selatan

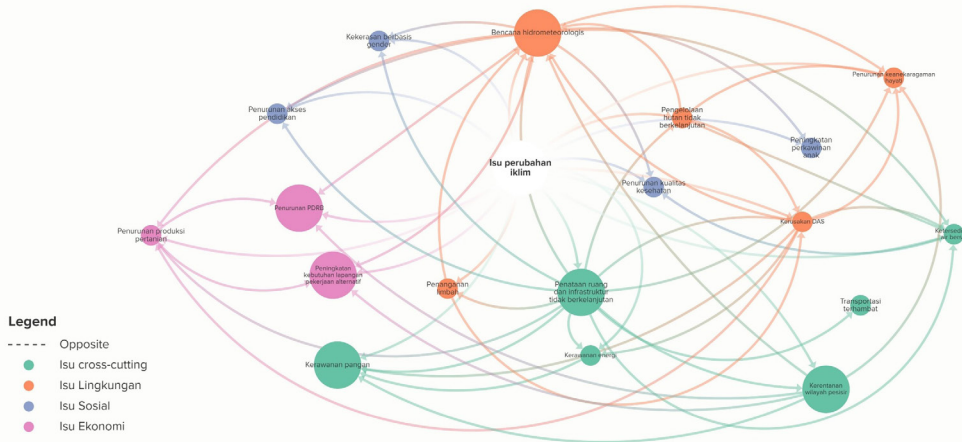
1. Penurunan produktivitas (gagal panen)	2. Meningkatnya intensitas bencana	3. Putus sekolah & perkawinan anak	4. Rendahnya kualitas layanan kesehatan
1.1. Perbedaan akses perempuan dan laki-laki terhadap saprodi pertanian, permodalan, dan informasi	2.1. Laki-laki lebih banyak terlibat dalam perencanaan infrastruktur lingkungan	3.1. Pendidikan layak sulit diakses anak-anak di perdesaan	4.1. Jalan yang rusak sehingga sulit menjangkau layanan kesehatan, terutama difabel dan lansia
1.2. Partisipasi perempuan dalam penyuluhan dan kelompok tani (terutama perikanan) masih terbatas	2.2. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga lebih tinggi	3.2. Keputusan untuk tidak menyekolahkan anak karena keamanan, terutama perempuan	4.2. Lansia dan difabel tidak memiliki saluran layanan darurat kesehatan
1.3. Kurang pengawasan terhadap penggunaan zat kimia, tata kelola air dan pengendalian hama belum optimal (dominasi laki-laki)	2.3. Kurangnya penyediaan sarana penampungan sementara yang layak/ sesuai kebutuhan	3.3. Pendidikan untuk anggota keluarga laki-laki lebih diprioritaskan karena menjadi tulang punggung	4.3. Keputusan keluarga dalam memilih layanan proses kelahiran menjadi prioritas
1.4. Gagal panen menurunkan pendapatan rumah tangga. Laki-laki mencari pendapatan tambahan & perempuan harus mengatur kebutuhan rumah tangga,		3.4. Kasus kekerasan seksual di lokasi bencana meningkat sehingga harus dinikahkan	4.4. Tingkat kematian ibu, bayi, dan balita masih cukup tinggi

5. Degradasi DAS, jasling, & kehati	6. Ketersediaan air bersih	7. Kerawanan pangan & energi	8. Kerentanan pesisir
5.1. Laki-laki memiliki akses pengelolaan lahan lebih tinggi dibandingkan perempuan	6.1. Akses laki-laki dalam pembangunan/ pemeliharaan infrastruktur air bersih lebih besar	7.1. Akses energi listrik perdesaan terbatas, akses edukasi panganekegaragaman pangan rendah	8.1. Rendahnya akses edukasi laki-laki dalam menjaga terumbu karang dan mangrove
5.2. Partisipasi masih rendah dalam pengelolaan lahan berkelanjutan	6.2. Partisipasi perempuan dalam penyediaan air bersih rumah tangga lebih besar	7.2. Perempuan berperan memenuhi energi RT di perdesaan, edukasi pemenuhan gizi keluarga rendah	8.2. Rendahnya partisipasi masy pesisir dalam menjaga kelestarian terumbu karang dan mangrove
5.3. Rendahnya pengawasan dalam menjaga tutupan hutan dan lahan dilindungi	6.3. Kontrol terhadap kualitas baku mutu dan pembuangan limbah masih rendah	7.3. Alih fungsi lahan produksi pangan, pengawasan stabilitas harga dan distribusi pangan	8.3. Rendahnya pengawasan dan penindakan pelaku pengrusakan terumbu karang dan mangrove
5.4. Belum ada pengakuan masyarakat adat dan tanah adat	6.4. Penerima manfaat air bersih di kota lebih tinggi dibandingkan di desa	7.4. Manfaat pembangunan sarana irigasi dan embung untuk mengatasi kekeringan	



Sesi diskusi, mengidentifikasi berbagai program pembangunan daerah yang dapat mengatasi kesenjangan gender dalam mewujudkan pembangunan berketahanan iklim

Ilustrasi keterkaitan antar isu
kesenjangan gender dan perubahan iklim di Provinsi Sulawesi Selatan



Apabila dikelompokkan ke dalam aspek yang lebih luas, isu-isu yang teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi:

- Isu lingkungan: Peningkatan bencana hidrometeorologis (longsor, banjir); degradasi DAS; alih fungsi lahan hutan dan kawasan lindung; penurunan keanekaragaman hayati
- Isu ekonomi: Penurunan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan; penurunan PDRB, dan peningkatan kebutuhan lapangan pekerjaan alternatif.
- Isu sosial: Peningkatan anak putus sekolah; penurunan kualitas kesehatan; perkawinan dan perdagangan anak
- Cross-cutting: Penataan ruang dan kerusakan infrastruktur; kerawanan pangan; kerawanan energi; penurunan ketersediaan air bersih; kerentanan wilayah pesisir.



<https://agroforestri.id/isukesenjangangenderSulsel>

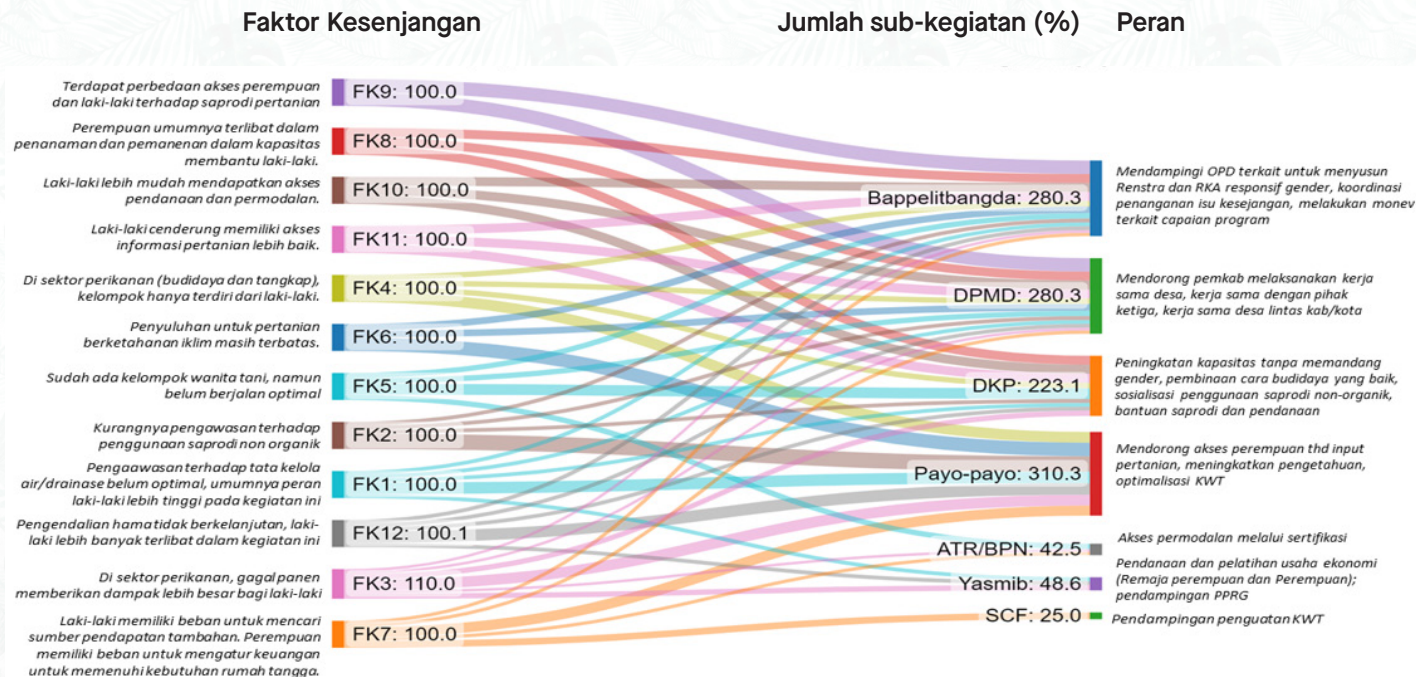
Peran multi-pihak untuk mengatasi isu kesenjangan gender di Provinsi Sulawesi Selatan

Bappelitbangda	Dinas Sosial	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pendidikan	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Permukiman	Dinas Kelautan dan Perikanan
Mendampingi perangkat daerah dalam menyusun renstra yg berbasis analisis kesenjangan gender meliputi isu kesenjangan yg teridentifikasi	Pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat miskin di perkotaan, pesisir, dan perdesaan	Melakukan pembinaan SDM, lembaga, dan pranata tradisional	Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan	Merekomendasikan kepada pemrakarsa usaha pada proses pembahasan dokumen lingkungan untuk melibatkan masyarakat dan mensosialisasikan pada masyarakat terkait IPAL yang dibangun sesuai kewenangan provinsi	Optimalisasi pemanfaatan/ penggunaan energi terbarukan	Tersedianya PSU dalam menunjang fungsi permukiman (Dalam Lingkungan)	Bantuan bibit bagi kelompok petani/nelayan, termasuk kelompok perempuan
Melakukan asistensi penyusunan rencana anggaran yg menjawab isu kesenjangan	Program Keluarga Harapan (berbasis keluarga). Terdapat bantuan pendanaan peruntukan anak sekolah.	Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus/layanan khusus	Menyusun kebijakan pengelolaan persampahan yang informatif, edukatif, dan responsif gender sesuai kewenangan provinsi dan mensosialisasikan kepada masyarakat	Pemerataan akses terhadap kelistrikan	Facilitasi pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Bantuan permodalan untuk pengelolaan pasca panen, sebagian besar penerima kelompok perempuan
Melakukan koordinasi dalam penanganan isu kesenjangan terkait perubahan iklim	Pendataan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana serta trauma healing untuk korban bencana (sarana dan prasarana untuk perempuan dan anak)	Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi		Melakukan koordinasi, fasilitasi, dan penyediaan data informasi dalam rangka pengakuan terhadap masyarakat adat dan tanah masyarakat adat	Pemenuhan sumber energi khususnya untuk rumah tangga		Sosialisasi terhadap kelompok petani/nelayan terkait terkait cara budidaya yang baik (CBIB)
Melakukan monev atas pencapaian kinerja mengatasi kesenjangan gender dampak perubahan iklim	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas			Pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan taman nasional, suaka margasatwa, dan cagar alam sesuai kewenangan provinsi			Restocking terhadap biota langka perikanan
							Sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok nelayan dalam menjaga terumbu karang dan mangrove
							Pembinaan kepada kelompok petani untuk meningkatkan diversitas sumber penghidupan
							Rehabilitasi terhadap mangrove dan terumbu karang

Peran multi-pihak untuk mengatasi isu kesenjangan gender di Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan	ATR/BPN	BPBD	Payo-payo	Sulawesi Community Foundation	Walhi	Yasmib
Mendorong Pemerintah kabupaten membentuk DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak)	Sosialisasi Pekarangan Pangan Lestari dalam mendukung pangan B2SA (Beragam Bergizi, Sehat dan Aman)	Mendorong kemudahan aksi permodalan melalui aset sertifikasi	Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan	Optimalisasi peran Kelompok Wanita Tani termasuk pemanfaatan lahan pekarangan	Pendampingan penguatan Kelompok Wanita Tani	Kelompok/komunitas relawan membentuk posko trauma healing di lokasi bencana	Meningkatkan kapasitas OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusi
Mendorong pemerintah kabupaten untuk melaksanakan 1) kerjasama desa, 2) kerjasama dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi/Perusahaan/Mandiri - perorangan), 3) kerjasama desa lintas kabupaten/kota	Promosi penganekaragaman melalui kegiatan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi Sehat dan Aman)	Memperkuat kelembagaan masyarakat	Melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana	Meningkatkan pengetahuan kelompok perempuan terhadap perubahan iklim dan dampaknya	Memberikan pemahaman (Sharing Knowledge) tentang kesetaraan gender	Advokasi kebijakan pro-lingkungan dan perubahan iklim, serta pengawasan penggunaan lahan	Mendorong kebijakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusi
	Gelar pangan murah untuk mengintervensi lonjakan harga dan pemerataan pangan akibat kelangkaan pasokan	Penataan ruang koordinasi dengan PUPR Provinsi	Melaksanakan pemulihan sosial pasca bencana	Kampanye penggunaan sumber daya air dan energi berkelanjutan	Sosialisasi tentang perlindungan terumbu karang dan mangrove	Pendampingan dan edukasi mengenai pupuk organik dan proses produksi dan distribusi yang adil	Pendanaan dan pelatihan usaha ekonomi bagi kader komunitas (Remaja perempuan dan Perempuan)
	Rehabilitasi sosial dasar perundang disabilitas		Mengupayakan pemenuhan logistik kebutuhan dasar sesuai kebutuhan spesifik korban bencana	Mendorong partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur	Peningkatan kapasitas perempuan pesisir dalam pengelolaan basis laut	Edukasi kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan, dll) terkait pentingnya biota laut dan pengelolaan lanskap	Mendorong DRPPA desa ramah perempuan dan anak
				Membuat basis data desa untuk kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk basis data lansia dan difabel	Sosialisasi, edukasi, dan advokasi pengawasan alih fungsi lahan	Analisis regulasi dan mengawal perkara perdata/pidana terkait masalah lingkungan dan lahan	Mengadvokasikan terkait pencegahan perkawinan anak/dini
				Menyediakan ruang belajar untuk perempuan			
				Penyediaan kebutuhan perempuan, anak, lansia, dan difabel dalam masa darurat bencana			

Ilustrasi pemetaan faktor kesenjangan dengan peran dan program OPD/lembaga





In partnership with
Canada



World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Program

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115

[PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia | Tel: +(62) 251 8625 415

Fax: +(62) 251 8625416 | Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org

www.worldagroforestry.org/country/Indonesia

www.worldagroforestry.org/agroforestry-world

#LahanUntukKehidupan

www.lahanuntukkehidupan.id

